



ELIMINASI RADIKALISME MELALUI PENDIDIKAN DASAR BERBASIS PERDAMAIAN

Zeni Hafidhotun Nisak*¹, Vira Amalia Safitri*²

^{1,2}STAI Sunan Pandanaran Sleman, D.I Yogyakarta, Indonesia

¹jeeannisa@gmail.com, ²viraamalya14@gmail.com

Abstract. Extremism is not born in a vacuum. There are various factors that can influence the emergence of extreme attitudes, which based on the above data can be summarized as the following factors. First, the factor of education and the introduction of religious teachings or views that are influenced by elements of understanding that are closed, anti-dialogue and black-and-white (true-false). Lately, extreme threats and radical actions always appear that are carried out by certain groups, which can disturb society and threaten the pillars of citizenship that bind us together in a unitary state. The design of the educational curriculum used by tackling extremism, the solution that must be taken requires an approach that cannot be separated from the context of tolerance. The meeting point that can be the basis for recommendations in this regard is to consider aspects of the importance of citizenship (citizenship). An important principle of the approach to citizenship in relation to democracy, and pluralism, is desecuritization, which rejects the logic of securitization. In addition, moderate Islamic education, multicultural education, and pesantren are strategies that need to be thought and carried out to overcome the work of the drivers of the emergence of extremism and design a curriculum of Islamic religious education that is compatible.

Keywords: Peace Education; Extremism; Primary Education, Pea

A. PENDAHULUAN

Umat manusia terlahir tidak cenderung menjadi ekstremis dan pro-kekerasan. Proses sosial, budaya dan politik tertentulah yang membentuk karakter ekstremisme. Perang melawan ekstremisme harus dipahami sebagai upaya untuk memulihkan kemanusiaan, mengajak manusia kembali pada jati diri manusiawi yang non-ekstrem dan menolak segala bentuk kekerasan. Kata-kata ekstremisme dan radikalisme (dalam konteks) sejauh ini tidak terdefiniskan dengan baik dalam wacana publik, bahkan dalam komunitas profesional dan akademis yang mempelajarinya. Ada banyak definisi berbeda yang ditawarkan, namun tidak ada yang diterima sebagai definisi tunggal untuk diadopsi secara universal. Data yang dipublikasikan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menunjukkan adanya 814.594 situs online penyebar ekstremisme yang membawa identitas keagamaan. Terkait dengan hal itu, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran semenjak tahun 2010. Meskipun demikian, jumlah situs yang mengenalkan ajaran yang bersifat ekstrem, dalam arti bertentangan dengan konstitusi dan

dasar negara Republik Indonesia terus bertambah. Artinya pemblokiran suatu situs online kelompok ekstrem bukanlah cara efektif untuk mencegah ajaran ekstrem mereka.

Tahun 2016 LIPI melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 76,2% guru menyatakan setuju penerapan syariat Islam dan mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Temuan ini mengejutkan, karena para guru ini berada di lembaga pendidikan sehingga berpotensi untuk menyebarkan ajaran yang mengarah kepada ekstremisme keagamaan di sekolah-sekolah. Sementara itu riset Wahid Institute yang bekerja sama dengan LSI pada tahun 2016 terhadap 1.520 siswa di 34 Propinsi menunjukkan bahwa 7,7% siswa SMA bersedia melakukan aksi-aksi radikal. Penelitian Setara Institute menunjukkan hasil 7,2% responden mereka setuju dengan dan tahu tentang paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hasil-hasil kajian di atas menunjukkan adanya fakta lapisan masyarakat yang terpapar informasi dan pandangan aktivitas ekstremisme agama, termasuk dalam urusan kepentingan sosial dan politik.

Sangat memprihatinkan ketika melihat berbagai fakta bahwasanya pendidikan sudah terpengaruh ekstremisme baik secara langsung ataupun melalui media online yang sangat populer akhir-akhir ini. Karena itulah, upaya membentengi generasi penerus dari keterpengaruhan ajaran dan ajakan ekstremisme menjadi tugas bersama. Hal tersebut diharapkan dapat menetralkan setiap perkembangan ekstremisme yang saat ini masih berkembang secara terselubung. Selain itu diharapkan lapisan masyarakat khususnya peserta didik mendapatkan pencerahan mengenai ekstremisme mengingat sasaran yang dituju adalah usia produktif dan pelajar.

Ditinjau dari deskripsi di atas, dengan begitu peneliti ingin mengulas bagaimana fenomena ekstremisme saat ini, kaitannya dengan pendidikan agama Islam dan seperti apa desain kurikulum yang kompetibel dalam menaggulangi ekstremisme serta relevansinya terhadap pendidikan dasar sekarang ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah segala hal yang berkaitan dan relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi fenomena ekstremisme serta relevansinya terhadap pendidikan dasar. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, dan internet. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Ekstremisme

Ekstremisme tidaklah lahir pada ruang hampa. Ada beragam faktor penyebab yang bisa jadi memberikan pengaruh pada kemunculan sikap ekstrem, yang berdasarkan data-data di atas bisa disimpulkan menjadi faktor-faktor berikut ini. Pertama, faktor pendidikan dan pengenalan ajaran atau pandangan keagamaan yang dipengaruhi oleh unsur pemahaman yang tertutup, anti-dialog dan bersifat hitam-putih (benar-salah). Pemikiran keagamaan yang ekstrem selalu ada namun tidak meluas karena secara umum masyarakat Indonesia bersikap moderat, sinkretik dan terbuka atas perbedaan. Seiring dengan derasnya informasi dan ajaran yang ekstrem melalui berbagai saluran media informasi, maka terjadi penyerapan yang signifikan dalam sikap dan pemikiran, tanpa harus menjadi bagian dari gerakan tersebut. Di dalam komunitas organisasi moderat seperti NU dan Muhammadiyah pun, beberapa pemikiran ekstrem diterima dan menjadi bagian dari keyakinan keagamaan yang dianggap valid, dengan tidak mengindahkan inkonsistensi pemikiran tersebut dengan gagasan keorganisasian yang lentur.

Akhir-akhir ini ancaman dan tindakan radikal, ekstrim selalu bermunculan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, yang dapat meresahkan masyarakat serta mengancam pilar-pilar kewarganegaraan yang mengikat kita bersama dalam sebuah negara kesatuan. Mereka tergolong kepada kelompok aliran keras yang fanatik, keras kepala, kasar, selalu berprasangka buruk, berpandangan sempit dan kaku. Seakan-akan ruang keberagaman di Tanah Air sudah pengap dengan kekerasan dan kebrutalan. Azyumardi mengistilahkan dengan eksklusivisme ekstrim adalah jenis eksklusivisme yang sangat tertutup, dikotomi (benar-salah), dan radikal. Kelompok ini hanya membenarkan mazhabnya sendiri dengan serta merta menyalahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan mazhab lain. Islam secara normatif-doktrinal, dengan tegas menyangkal dan menolak sikap eksklusif. Tapi menawarkan solusi-solusi yang lebih bersifat realistik, praktis, konstruktif dan kondusif untuk menumbuhkan iklim tenggang rasa, simpati, dan toleransi antar satu kelompok dengan lainnya.

Dalam hidup yang penuh kemajemukan hendaknya ada kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa ataupun agama. Bahkan ini merupakan pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, dan juga merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat manusia. (Mansur Alam, 2017: 25). Indonesia dengan bentuk negara demokrasi adalah bentuk yang sesuai dengan keadaannya yang beragam. Pancasila, UUD 1945 adalah dasar negara yang tepat untuk menyatukan berbagai perbedaan agama, suku, budaya dan pulau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu munculnya radikalisme adalah disebabkan karena pemahaman yang sempit, tekstual, skriptual, kaku dan tanpa melihat aspek historisitas dan sosial kultur sebuah ajaran. Pemahaman semacam itulah kemudian memunculkan interpretasi sikap keagamaan yang galak dan keras, yang pada

gilirannya melahirkan aksi kekerasan, radikal bahkan teror. Tegasnya, interpretasi Islam yang kaku, skriptural, dan telah menyumbang bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan dimana-mana. Ditambah lagi dengan kecenderungan kelompok skripturalis yang lebih suka dan akrab dengan ayat-ayat pedang (jihad), pengkafiran (takfir), dan pemusrikan (tasyrik). Mereka lebih suka memilih ayat-ayat yang memiliki kandungan berbuat keras ketimbang ayat-ayat yang pro-perdamaian.

2. Ekstremisme dan Praktek Pendidikan Agama

Paradigma pembangunan pendidikan saat ini telah melupakan keragaman yang sekaligus kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Perkelahian, kerusuhan, permusuhan, munculnya kelompok yang dimiliki perasaan bahwa hanya budaya-budaya saja yang lebih baik dari budaya lain adalah buah dari pengabaian keragaman tersebut dalam dunia pendidikan. Sikap ekstrem dalam mengimplementasikan ajaran agama menampakan sejumlah fenomena berupa perilaku, sikap, pemikiran, dan mentalitas. (Amanullah Halim, 2015:10) Pendidikan selalu mencari solusi dengan menemouh jalan tengah, tidak ekstrem atau berlebih-lebihan, cinta damai dan selalu bertindak dengan rasional, melalui pertimbangan akal yang benar.

Pendidikan Islam selama ini pada umumnya terkesan hanya mementingkan hubungan vertikal dengan sang pencipta Allah SWT dalam bentuk ibadah semata, sebaliknya kurang mempedulikan hubungan horizontal dengan sesama manusia, atau tanpa memperalelkan dengan kewajiban terhadap sesama makhluk manusia dan lingkungan hidup, dalam arti peduli lingkungan sosial dan lingkungan hidup sudah terabaikan. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia tidak berjalan secara intim, tidak menjalin persahabatan dengan akrab, bahkan dijadikan musuh, tidak empati dan simpati kepada sesama manusia.

3. Desain Kurikulum Pendidikan Berbasis Perdamaian

Menyikapi situasi masifnya penyebaran ekstremisme pendidikan Islam moderat mesti menjadi prioritas utama dalam mencegah tindakan ekstrimisme, karena Islam telah dipelajari secara utuh dan kaffah atau menyeluruh dan komprehensif, yang menampilkan 'jalan tengah' sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dengan penganut faham dan agama lain, bukan secara parsial terputus-putus atau separo-separo, yang bisa membuat ekstrim, eksklusif dan intoleransi. Islam jalan tengah yang menolak ekstremisme dan radikalisme, baik kiri maupun kanan. (Azyumardi Azra, 2016: 257).

Adapun pendidikan Islam moderat sangat mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin. Islam yang membawa rahmat, dapat menyejukkan, meneduhkan, kasih sayang dan kelembutan kepada segenap insan. Memiliki budaya gotong royong, tolong menolong, saling menghargai dan saling menghormati. Selalu mengedepankan nilai egaliterianisme yang memandang semua orang sederajat dan tidak diskriminatif dalam hal agama, suku/etnis, warna, kulit,

bahasa, sosial, dan lainnya. Pendidikan moderat selalu mengajarkan untuk melakukan tindakan yang sangat rasional. Seorang rasionalis akan selalu bertindak cerdas, berpikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan penuh perhitungan, rasa ingin tahu yang tinggi, berkomunikasi efektif dan empatik, bergaul secara santun, menjunjung kebenaran dan kebajikan, mencintai Tuhan dan lingkungan.

Pendidikan Islam moderat diharapkan dapat disosialisasi kepada masyarakat secara masif, dan diinternalisasi, diimplementasikan, bahkan harus sampai ke traninternalisasi, sehingga terwujudnya sikap mental (kepribadian) sesama, dan menjadi watak berlaku secara istiqamah dan sulit digoyahkan oleh situasi apapun. (M Djafar Alamsyah, 2018: 109), Dalam hal ini harus mendapat dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat agar menjadi kekuatan garda depan dalam merepresentasikan Islam Indonesia yang ramah dan progresif, sekali gus sebagai kekuatan moral untuk membendung serta memerangi segala bentuk ekstrimisme.

Pendidikan multikultural yang juga merupakan bagian dari pembangunan mental para peserta didik yang mana memiliki kesamaan dalam hal unsur-unsur pembangunan karakter dalam transformasi pengetahuan. Sehingga, menempatkan pendidikan multikultural tersebut sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural, maka kepemimpinan kurikulum (curriculum leadership) menjadi pemegang kunci. Keberhasilan pendidikan multikultural bergantung pada bagaimana kurikulum di sekolah tersebut akan dikemas sedemikian rupa sehingga pandangan atau perspektif pluralism, demokrasi, penghargaan atas perbedaan dapat diterjemah sebagai nilai, pandangan dunia, sikap dan perilaku secara teoritik maupun praktis. Jadi, dalam kurikulum pendidikan multikultural tidak bisa lagi menjadikan nilai dan tradisi dominan menguasai praktek pembelajaran di sekolah

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan sejak dahulu memainkan peranan yang strategis terutama dalam mempengaruhi pola pikir, pengetahuan, pemahaman, dan perilaku keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Melalui pendidikan yang diselenggarakannya, pesantren berperan sebagai alat transformasi kultural dan sosial yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Kurikulum yang diimplementasikan pada dasarnya bersifat fundamental dan berpotensi dimaknai secara radikal, terutama yang bertumpu pada mata pelajaran akidah/ tauhid, fikih dan tafsir. Tiga mata pelajaran ini yang menyediakan perangkat pengetahuan untuk merespons kondisi sosial masyarakat. Tiga mata pelajaran ini pula yang menyediakan konstruksi pemahaman keagamaan yang berpotensi pada kecenderungan pemahaman radikal, terutama dalam membahas persoalan jihad, kafir dan hukum Islam, apalagi jika dipahami secara dogmatis dan radikal, maka akan memiliki potensi radikalisme.

Sebaliknya jika dipahami secara kontekstual atau moderat, bisa meminimalisasi potensi radikalisme. Dalam menangkal pemahaman yang radikal dari ketiga materi tersebut maka perlu adanya penyeimbang sebagai

upaya memahami ajaran Islam secara komprehensif. Materi/ mata pelajaran itu telah mendapatkan penyeimbang, misalkan materi fiqh dimbangi dengan materi ushul fiqh. Dalam pengajaran akidah, untuk menangkal pemahaman yang radikal, diimbangi dengan materi tasawuf atau akhlak. Bidang selanjutnya adalah tafsir. Seringkali tafsir al-Qur'an maupun al-Hadits dipahami secara tekstual. Untuk menghindari pemahaman yang tidak komprehensif harus ada seperangkat ilmu itu diharapkan al-Qur'an maupun al-Hadits dapat dipahami secara komprehensif dan utuh, sehingga secara substansi dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kondisi zaman.

4. Relevansi terhadap Pendidikan Dasar

Pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai humanisme dan multikulturalisme pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai kemanusiaan yang diejawantahkan dalam pendidikan. Guru sebagai pelaku pendidikan yang bersentuhan langsung hendaknya memiliki karakter tersebut sehingga pada akhirnya dapat ia tularkan kepada peserta didiknya. Konsep guru berwawasan multikultural memiliki nilai-nilai yang menjadi bekal yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Mengingat bahwa ekstremisme dalam pendidikan kerap terjadi dan tidak jarang melibatkan siswa sebagai pembelajar.

Sekolah harus mengembangkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan. Pendidik di sekolah berbasis etnik-agama tertentu sudah seharusnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Misalnya, sekolah-sekolah dengan basis agama tertentu harus mengajarkan kepada peserta didiknya tentang nilai-nilai keagamaan secara universal. Pendidik harus menanamkan nilai perdamaian dan keadilan. Mereka harus mengajarkan tidak ada agama dan etnis tertentu yang mengajarkan kekerasan, diskriminasi dan terorisme.

Pendidikan dasar utamanya perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menghalau nilai-nilai radikalisme yang muncul dalam diri siswa. Salah satu caranya adalah dengan menginternalisasikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi serta merayakan perbedaan yang dijunjung tinggi di negara Indonesia dengan slogan Bhineka Tunggal Eka (berbeda beda namu tetap satu jua). Desain strategis tersebut dapat penulis gambarkan dengan skema di bawah ini:



Rangkaian aktifitas diatas dapat dilakukan dengan konsep Peace Camp dengan detail fase fase kegiatan ((McClynn, 2009:15-17) yang akan dijelaskan dibawah ini; *Pertama*, mengakui **Fase kesamaan kultural**. Pendekatan ini mengajak siswa untuk masuk dalam prinsip bahwa semua orang pada dasarnya sama. Di balik perbedaan, selalu ada kesamaan aspek yang bisa menjadi modal untuk bersatu. Persamaan inilah yang dipakai sebagai pintu masuk penerimaan diri sendiri terhadap orang lain. Kesamaan yang muncul menjadi penghantar bahwa ada sesuatu yang universal yang menjadi perekat bagi anta umat manusia. Kedua, **Fase merayakan perbedaan**. Pendekatan ini lebih menekankan pada perbedaan daripada kesamaan. Perbedaan harus diakui sekaligus diberi ruang untuk mencurahkan keragaman tersebut. Lebih dari itu, perbedaan tersebut harus menjadi bahan diskusi bersama bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk justru dipakai sebagai pintu gerbang penerimaan diri terhadap perbedaan. Kebersamaan jauh lebih mungkin setelah mengakui bahwa manusia pada dasarnya berbeda-beda. Melalui pendekatan ini, mereka meyakini bahwa dengan sendirinya bisa mengatasi perbedaan dan mencegah menjadi konflik. Ketiga, **Fase pendekatan kritis**. Pendekatan ini mengampanyekan agar anak-anak tidak hanya mengakui kesamaan dan perbedaan, tetapi peduli pada ketidakadilan sosial. Penyebab utama disintegrasi, menurut pendekatan ini, adalah ketidakadilan sosial. Selama ketidakadilan sosial masih kuat di masyarakat, maka integrasi tidak akan pernah berhasil. Rasisme dan radikalisme selama ini mendorong masyarakat terbelah dan mereka kemudian mencari pembenaran pada doktrin agama. Terakhir, **Fase penyatuan**. Pada fase ini siswa akan diajak untuk mendesain narasi, sikap, kegiatan dan setting yang toleran untuk menemukan persamaan, merayakan perbedaan dan memulai aksi untuk baik secara individu maupun kolektif untuk menumbuhkan toleransi dan perdamaian.

Dalam proses pembelajaran di kelas, guru sekali-kali dapat menyuruh peserta didik untuk membuat narasi tentang dirinya tentang kehidupan dan latar belakangnya darimana ia berasal. Narasi tersebut dipresentasikan didepan kelas. Sehingga teman-temannya yang lain tahu latar belakang kehidupan masing-masing setiap peserta didik. Langkah tersebut sebagai upaya untuk menjembatani gesekan yang sering terjadi antar suku di Indonesia. Misalnya, peserta didik yang berasal dari suku Jawa dapat mengisahkan latar belakang hidupnya, orang tuanya dan darimana ia berasal. Sehingga peserta didik lain dapat mengetahui dan memahaminya. Begitupun sebaliknya peserta didik yang berasal dari suku atau etnis yang lain. Kegiatan ini cocok diterapkan pada kelas yang terdiri dari peserta didik yang berasal dari etnis yang beragam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan terhadap ekstremisme di Indonesia dan desain kurikulum pendidikan yang digunakan oleh untuk menanggulangi ekstremisme, solusi yang harus diambil memerlukan pendekatan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks toleransi. Titik temu yang dapat menjadi dasar rekomendasi dalam hal ini adalah dengan memperhatikan aspek pentingnya kewarganegaraan (*citizenship*). Prinsip penting pendekatan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan demokrasi, dan pluralisme, adalah desekuritisasi (*desecuritization*) yang menolak logika sekuritisasi (*securitization*). Logika desekuritisasi adalah pendekatan demokratis dan pemenuhan hak oleh negara berdasarkan kesetaraan sebagai warga negara.

Strategi yang perlu dipikirkan dan dilakukan untuk mengatasi bekerjanya faktor-faktor pendorong munculnya ekstremisme yang selama ini terjadi hendaknya tidak mengulang kesalahan yang sama yang sesungguhnya dapat didekati dengan strategi pemenuhan hak warga negara di mana mereka dalam kondisi yang majemuk dan sebagian besar dari mereka berada dalam logika sosial yang bersifat komunitarian. Langkah-langkah paralel yang diperlukan berdasarkan gambaran situasi di atas harus mengedepankan prinsip desekuritisasi yang terkait dengan sejumlah faktor berikut ini:

- 1) Terhadap faktor pendidikan dan pengenalan ajaran atau pandangan keagamaan yang mengandung pemikiran dan sikap ekstrem, pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, kalangan pendidik (guru dan dosen) untuk membangun strategi pengenalan ajaran-ajaran agama tidak mengarah pada perspektif tunggal yang berbasis pada logika komunitarian yang bertentangan dengan prinsip multikultural masyarakatnya. Oleh karena itu secara strategis perlu didorong pada pemahaman yang lebih terbuka.
- 2) Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama bisa berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan Islam yang rahmat lil 'alamin dan toleran. Meskipun lembaga seperti pesantren sangat toleran dan terbuka namun

pendidikan keagamaan yang demikian adalah sumbangan terbesar yang diberikan pesantren.

- 3) Sebagai institusi pendidikan, sekolah harus mengembangkan pendidikan multikultural sedini mungkin. Pengembangan tersebut harus mencakup seluruh aspek mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, peserta didik dan pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanullah Halim, *Menangkal Ekstremisme Agama dan Fenomena Pengafiran*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Azyumardi Azra, *Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- M Djafar Alamsyah, *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- McGlynn, C., & Zembylas, M. (Eds.). *Peace Education In Conflict And PostConflict Societies: Comparative Perspectives*.Springer, 2009.
- Mansur Alam, “ Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi”, *Jurnal Islamika*, Vol. 17, Nomor 2, 2017.
- Miftahur Rohman, “Konsep Pendidik Berwawasan Multikultural dalam Lembaga Pendidikan”
- Moh Rosyid, “Model Pendidikan Peredam Pemikiran dan Gerakan Radikal Belajar dari Kudus”, *Quality*, Vol. 5, Nomor 1, 2017.
- _____, “Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia”, Jakarta Selatan: INFID, 2018.